

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini merupakan wujud dari Pertanggungjawaban Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah pada setiap tahun anggaran berakhir berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, diharapkan menjadi tolok ukur kinerja dari setiap kegiatan yang dikerjakan terkait dengan penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, sebagaimana yang disepakati pada tahun awal anggaran. Kemudian pengukuran kinerja tersebut dilihat menurut indikator kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana pada Renstra OPD dan Renja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau. Dari Pengukuran Kinerja dapat dievaluasi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan dan kebijakan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Harapan kami semoga LKjIP ini bermanfaat dan dipedomani bagi aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Malinau, 20 Januari 2021

Kepala DPMD Kab. Malinau



Padan Impung, S.Pd.,MM
NIP. 19650516 200112 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau selama Tahun 2020. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, untuk Tahun 2020 ini dapat dikatakan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang sangat baik / sangat berhasil dengan total capaian kinerja sasaran sebesar **97%**.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala / hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau telah mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya,

sehingga pada tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Adapun kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau adalah masih Kurangnya staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau yang menangani pengelola kegiatan yang mendukung dalam kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, untuk itu perlu ditingkatkannya pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana dan prasarana demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau serta Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau (DPMD) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Desa, Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malinau mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Aspek Strategis Organisasi

Analisis Lingkungan Strategis merupakan identifikasi aspek strategik yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau yang dititik beratkan pada kegiatan-kegiatan lintas sektor maupun lintas program yang selama ini berjalan dengan sistem koordinasi sehat, terpadu dan terarah. Tentunya aspek tersebut merupakan faktor kunci perumusan kebijakan dan keberhasilan pencapaian sasaran.

Uraian tentang faktor kunci keberhasilan / aspek strategis ini dapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Faktor-faktor kunci tersebut antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi, termasuk juga sumberdaya, dana, sarana dan prasarana serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan Instansi Pemerintah dalam kegiatan-kegiatannya.

Adapun aspek strategis dimaksud adalah :

Aspek Strategis Organisasi

1. Lingkungan Internal

Dilakukan melalui telahan dan pencermatan lingkungan internal organisasi yang mengidentifikasi kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness).

a. Kekuatan (Strenght)

1. Tersedianya pegawai dengan klasifikasi pendidikan yang bervariasi
2. Komitmen pimpinan daerah terhadap pemberdayaan masyarakat
3. Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

b. Kelemahan (Weakness)

1. Terbatasnya Anggaran
2. Belum maksimalnya pelaksana-an tugas sesuai tupoksi
3. Rendahnya kualitas dan kuantitas pegawai
4. Rendahnya pengetahuan pegawai dalam pengelolaan dan pengembangan TTG

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang /Opportunity

1. Tersedianya SDA di masyarakat untuk pengelolaan alat TTG
2. Undang-undang nomor 32 dan UU nomor 33 tahun 2004 serta PP nomor 72
3. UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Tingkat partisipasi dan peran serta masyarakat di dalam mensukseskan pembangunan cukup tinggi

5. Apresiasi positif masyarakat dan lembaga di Desa
6. Hubungan kerja lintas sectoral yang kondusif
7. SDA yang memadai secara kuantitas

b. Ancaman / Threat

1. Masyarakat tidak mampu mengelola dan mengembangkan SDA yang ada menjadi suatu alat yang bermanfaat
2. Adanya kesenjangan biaya hidup masyarakat yang belum merata
3. Koordinasi lintas sectoral
4. Tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat masih rendah

D. Struktur Organisasi

Gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama bisa kita lihat melalui struktur Organisasi Perangkat Daerah yaitu cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dengan susunan unit kerja eselon III terdiri dari : Sekretaris Dinas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pengembangan Desa, Bidang Kelembagaan Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya. Secara lengkap Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

Bagan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Kabid Pemerintahan Desa, membawahi :
 1. Kasi Administrasi Pemerintahan Desa
 2. Kapasitas Aparatur Desa dan Penataan Desa
 3. Kasi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa
- d. Kabid Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi :

1. Kasi Pengembangan Partisipasi Masyarakat
 2. Kasi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat
 3. Kasi Sosial Budaya dan Kesejahteraan Masyarakat
- e. Kabid Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pendaya Gunaan SDA & TTG, membawahi :
1. Kasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
 2. Kasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 3. Kasi Pendayagunaan SDA & TTG

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan segala potensi dan peluang serta kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan jangka menengah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau khususnya dengan prioritas pembangunan di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 berisikan arah kebijakan pembangunan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau dalam 5 (lima) tahun sebagai pedoman membangun Kabupaten Malinau yaitu :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN”

Kabupaten Malinau yang Maju adalah suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu dan merata sampai keseluruhan desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan.

Kabupaten Malinau yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Malinau secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat Malinau terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong rotong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) adalah gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan membangun desa untuk mewujudkan Kabupaten Malinau yang Maju, Sejahtera, Aman, Nyaman dan Damai. GERDEMA merupakan paradigma pembangunan Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan desa. GERDEMA juga menegaskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih bertumpu pada inisiatif dan partisipasi masyarakat desa sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan.

Guna mewujudkan visi tersebut di atas maka beberapa misi yang akan dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik;
2. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu : jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;
4. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;

5. Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa : *“one village one product”* dengan semboyan “Bertani Sehat”;
6. Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa;
7. Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan : Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun;
9. Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
10. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;
11. Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah;
12. Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Malinau, maka misi yang didukung sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah misi ke-12 yaitu Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif menggambarkan arah strategi instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 adalah :

“Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan di Desa”

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART (*Specific, Measurale, Attainable, Realistic, Time Bound*). Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas.

Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 adalah :

- 1. Meningkatkan Tata Kelolah Pemerintahan Desa.**
- 2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan pelayanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam membangun Desa.**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau beserta indikator kinerjanya yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Tata Kelolah Pemerintahan Desa	Persenatse Desa yang memimilki Profil Desa	0%	0%	0%	80%	85%
			Persentase Desa yang Menyusun APBDes Tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2.		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaa	Persentase partisipasi Masyarakat yang aktif dalam	67%	70%	87%	88%	90%

		n Masyarakat dan Pelayanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Membangun Desa	musrenbangdes					
			Persentase BUMDes Yang Aktif	60%	85%	90%	95%	98%

2. Indikator Kinerja

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Tata Kelolah Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memimillki Profil Desa	Bidang Pemerintahan Desa
		Persentase Desa yang Menyusun APBDes Tepat waktu	Bidang Pemerintahan Desa
2.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pelayanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Membangun Desa	Persentase partisipasi Masyarakat yang aktif dalam musrenbangdes	Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya
		Persentase BUMDes yang Aktif	Bidang Pemerintahan Desa

Adapun indikator kinerja dan target Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja dan Target Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase Desa yang memiliki Profil Desa	45%	70%	70%	90%	92%	93%	93%
2	Persentase Desa yang Menyusun APBDes Tepat waktu	93%	100%	100%	90%	92%	93%	93%
3	Persentase partisipasi Masyarakat yang aktif dalam musrenbangdes	66%	67%	70%	87%	88%	90%	90%
4.	Persentase BUMDes Yang Aktif	60%	85%	90%	95%	98%	60%	85%

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah arah / tindakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan

program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Dalam mencapai tujuan dan sasarnya Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau memiliki beberapa strategi dan arah kebijakan, berikut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau

Visi : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun			
Misi 2 : Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi;			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan di Desa	Meningkatkan kualitas serta kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pembinaan kelembagaan - Peningkatan kemampuan tenaga kerja yang terampil dan terdidik - Mengoptimalkan peran BUMdes dan UMKM - Meningkatkan pembinaan pengurus lembaga ekonomi masyarakat desa dan ekonomi keluarga - Memfasilitasi 	<p>Arah dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan tenaga pelatih yang terampil - Memfasilitasi pembentukan BUMdes dan UMKM tiap-tiap desa - Pelimpahan urusan dan wewenang kepada desa dalam proses perencanaan pembangunan <p>Arah dan Kebijakan Pemberdayaan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan desa - Penyediaan balai pelatihan - Melakukan evaluasi kinerja satgas Gerdema - Meningkatkan kompetensi aparatur

		<p>dan mendampingi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan peran satuan tugas (SATGAS) Gerdema - Mengoptimalkan fungsi dan tugas aparatur desa - Pengembangan teknologi tepat guna 	<p>dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan kemampuan Pemerintahan desa dan penguatan lembaga kemasyarakatan <p>Arah dan Kebijakan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan balai pelatihan - Melaksanakan penelitian dan inovasi di bidang pengetahuan dan terapan
--	--	---	---

4. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh seluruh komponen organisasi guna mencapai sasaran dan tujuan.

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau tahun 2020 sebagai penjabaran dari tujuan strategis adalah sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor
3. Penyediaan Barang cetak dan Pengadaan
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur:

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
2. Penyusunan perencanaan, Lakip, dan Laporan Keuangan SKPD

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Peran BUMDES dalam Penyaluran RASDA
2. Sosialisasi dan Pelatihan Pengurus UMKM di Desa
3. Pelatihan Usaha Ekonomi Keluarga
4. Pengemabngan Usaha Bersama Kelompok Perempuan
5. Study Banding Kelompok Usaha Ekonomi Desa
6. Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
7. Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bersama (BUMDes bersama)
8. Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga berbasis Ekonomi Kreatif
9. Pelatihan Aparat Desa dalam Bidang Manajemen Pemanfaatan Kekayaan Desa
10. Fasilitasi Desa Binaan
11. Study Banding tentang Usaha Ekonomi Mikro
12. Pelatihan Tentang Fungsi dan Peran Adat bagi Masyarakat
13. Sosialisasi Penggalan Nilai – Nilai Budaya dan Adat serta pengadaan Buku tentang Adat dan Budaya.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pembinaan dan Monitoring Kegiatan RT Bersih
2. Fasilitasi Musrenbang RT
3. Fasilitasi Musrenbang Desa
4. Bulan Bakti RT Bersih
5. Pemilihan Kepala Desa Serentak Se – Kabupaten Malinau

6. Sosialisasi Kesadaran Anak Sekolah tentang RT Bersih
7. Fasilitasi Lembaga Pembangunan Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (LP3MD)
8. Lomba Desa
9. Lomba Kepala Desa Berprestasi
10. Fasilitasi Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESKEKEL)

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pelatihan Penataan data Aset dan Kekayaan Desa
2. Pembinaan dan Pelatihan Aparatur Desa dan RT
3. Penyusunan Profil Desa dan RT
4. Fasilitasi Tenaga Pendamping Desa
5. Pelatihan Satgas Gerdema
6. Fasilitasi Forum Komunikasi LPM di Kabupaten Malinau
7. Pelatihan Sistem Keuangan Desa
8. Pelatihan Penyusunan RPJMDes di Kecamatan/Kabupaten

Program Peningkatan Peran Peran Perempuan di Perdesaan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Penunjang Kegiatan PKK
2. Pembinaan dan SPEM program Kegiatan PKK
3. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Pengurus Organisasi dan Lembaga Pemuda Desa

Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
2. Sosialisasi tentang Gizi Masyarakat

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Lomba dan Gelar TTG Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten
2. Lomba Inovasi Tingkat SLTA dan Masyarakat
3. Pembangunan Gedung Posyantek

4. Pelatihan Pengelolaan Pemanfaatan TTG
5. Studi Banding Pengembangan TTG Baru
6. Penyediaan Buku katalog Alat TTG Kabupaten Malinau
7. Pendataan Kelompok TTG dan Alat TTG
8. Sosialisasi Program dan Alat TTG
9. Pameran TTG pada saat IRAU dan Ekspo Kab. Malinau dan luar Kab. Malinau
10. Pembinaan Kepada Pengurus Posyantek Kecamatan dan Desa
11. Pembentukan Lembaga Pelayanan TTG dan Pengurus Posyantek di Kecamatan
12. Rapat Koordinasi TTG
13. Pelatihan Penguatan Kelembagaan Posyantek

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang rencana jangka pendek akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau untuk mencapainya pada tahun 2020.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Target kinerja dari sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau
Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelolah Pemerintahan Desa	Persenatse Desa yang memimillki Profil Desa	%	90

		Persentase Desa yang Menyusun APBDes Tepat waktu	%	100
2.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pelayanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Membangun Desa	Persentase partisipasi Masyarakat yang aktif dalam musrenbangdes	%	90
		Persentase BUMDes Yang Aktif	%	95

Adapun Rencana Kerja terhadap program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Rencana Kerja Tahun 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/opresional	1 jenis	2.000.000
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	6 Dokumen	27.120.000
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	34 Jenis	11.747.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7 Jenis	13.584.000
		Penyediaan Makan dan Minum	10 Kali	4.950.000
		Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	110 Kali	180.520.000

		Penyediaan Bahan bakar Minyak	250 Liter	5.000.000
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan peralatan gedung Kantor	3 Unit	17.165.175
		Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	1 Unit	45.000.000

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Dengan Perjanjian Kinerja, diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau dapat lebih terarah dan terdapat tolok ukur bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Tata Kelolah Pemerintahan Desa.	Persentase Desa yang memiliki Profil Desa	85
		Persentase Desa yang Menyusun APBDes Tepat Waktu	100
2	Menigkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan usaha Ekonomi Masyarakat, Sosial dan Budaya dalam Membangun Desa.	Persentase Masyarakat yang aktif dalam Musrenbangdes.	80%
		Persentase BUMDes Yang Aktif	75%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	312.830.000	APBD
2.	Peningkatan Pean serta Kepemudaan	1.356.000.000	APBD
3.	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan hidup Pemuda	100.000.000	APBD
4.	Peningkatan Revitalisasi Gerakan Pramuka	37.500.000	APBD
5.	Prmbinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	600.000.000	APBD
	JUMLAH	2.406.330.000	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penilaian keberhasilan atas Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau tahun 2020 dapat diperoleh dari realisasi kinerja dan capaian kinerja disandingkan dengan target yang ingin dicapai pada Rencana Strategis dari kegiatan-kegiatan pada program yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Hal ini penting dilakukan sebagai bahan evaluasi dan pengkajian atas tingkat capaian keberhasilan maupun kegagalan dari kegiatan pada program yang dilaksanakan tersebut, sehingga memudahkan pimpinan untuk menentukan kebijakan dimasa yang akan datang.

Capaian kinerja terkait pencapaian indikator kinerja dari sasaran disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Starategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelolah Pemerintahan Desa	Persenatse Desa yang memimillki Profil Desa	90%	88%	98%
		Persentase Desa yang Menyusun APBDes Tepat Waktu	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pelayanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Membangun Desa	Persentase partisipasi Masyarakat yang aktif dalam musrenbangdes	89%	94%	98%
		Persentase BUMDes yang Aktif	90 %	94 %	98%

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau Tahun 2020 secara keseluruhan adalah sebesar 394% dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai capaian tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh indikator yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja sasaran strategis akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Desa yang memimilki Profil Desa

Target indikator Desa yang Memiliki Profil Desa tahun 2020 sebesar 90% dan terealisasi 88%, sehingga tercapainya kinerja indikator ini sebesar 98% Berikut Ini disajikan Tabel Jumlah Desa yang Mamiliki Profil Desa di Kabupaten Malinau Tahun 2020 :

Tabel 3.1
Data Jalan Kabupaten Malinau

NO	Kecamatan	Jumlah Desa yang Sudah Memilki Profil Desa	Jumlah Desa yang Belum Memiliki Profil Desa
1	Malinau Kota	6	
2	Malinau Utara	12	
3	Malinau Barat	9	
4	Mentarang	9	
5	Malinau Selatan	9	
6	Malinau Selatan Hilir	8	
7	Malinau Selatan Hulu	8	
8	Mentarang Hulu	7	
9	Sungai Tubu	5	
10	Kayan Hulu	5	
11	Kayan Selatan	4	1
12	Kayan Hilir	5	
13	Sungai Boh	4	2
14	Pujungan	5	4

15	Bahau Hulu	-	-
	Jumlah	96	7

Sumber : Bidang Pemerintahan Desa, 2020

2. Persentase Desa yang Menyusun APBDes Tepat Waktu

Target indikator Cakupan Desa yang menyusun APBDes Tepat waktu tahun 2020 sebesar 100% dan terealisasi 100%, sehingga tercapainya kinerja indikator ini sebesar 100%.

Berikut ini disajikan tabel jumlah Desa yang Menyusun APBDes Teapat Waktu di Kabupaten Malinau :

Tabel 3.2
Jumlah Desa Yang Menyusun APBDes Tepat Waktu di Kabupaten Malinau
Semester II Tahun 2020

NO	Kecamatan	Jumlah Desa Yang Menyusun APBDEs Tepat waktu
1	Malinau Kota	6 Desa
2	Malinau Utara	12 Desa
3	Malinau Barat	9 Desa
4	Mentarang	9 Desa
5	Malinau Selatan	9 Desa
6	Malinau Selatan Hilir	8 Desa
7	Malinau Selatan Hulu	8 Desa
8	Mentarang Hulu	7 Desa
9	Sungai Tubu	5 Desa
10	Kayan Hulu	5 Desa
11	Kayan Selatan	5 Desa
12	Kayan Hilir	5 Desa
13	Sungai Boh	6 Desa
14	Pujungan	9 Desa
15	Bahau Hulu	6 Desa
	Jumlah	109 Desa

Sumber : Bidang Pemerintahan Desa, 2020

3. Persentase partisipasi Masyarakat yang aktif dalam musrenbangdes.

Target indikator Persentase Partisipasi masyarakat yang aktif dalam musrenbang pada tahun 2020 sebesar 89% dan terealisasi 94%, sehingga tercapainya kinerja indikator ini sebesar 98%.

Berikut ini disajikan tabel jumlah Masyarakat yang aktif dalam Musrenbangdes Kabupaten Malinau :

Tabel 3.3
Jumlah Masyarakat yang aktif dalam musrenbangdes
Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH MASYARAKAT YANG TIDAK HADIR	JUMLAH MASYARAKAT YANG HADIR
1	Malinau Kota	180	10880
2	Malinau Utara	289	9780
3	Malinau Barat	259	9970
4	Mentarang	259	8960
5	Malinau Selatan	198	670
6	Malinau Selatan Hilir	230	400
7	Malinau Selatan Hulu	195	500
8	Mentarang Hulu	151	320
9	Sungai Tubu	157	570
10	Kayan Hulu	132	470
11	Kayan Selatan	133	360
12	Kayan Hilir	120	360
13	Sungai Boh	147	280
14.	Pujungan	190	290
15	Bahau Hulu	151	190
	JUMLAH	2.791	44.000

Sumber : Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, 2020

4. Persentase BUMDES yang aktif

Target indikator Persentase BUMDes yang aktif dalam pada tahun 2020 sebesar 90% dan terealisasi 94%, sehingga tercapainya kinerja indikator ini sebesar 98%.

Berikut ini disajikan tabel jumlah BUMDes yang aktif dalam Kabupaten Malinau :

Tabel 3.4
Jumlah BUMDES yang aktif Tahun 2020

NO	Kecamatan	Jumlah BUMDes
1.	Malinau Kota	6
2.	Malinau Utara	11
3.	Malinau Barat	8
4.	Mentarang	9
5.	Malinau Selatan	4
6.	Malinau Selatan Hilir	6
7.	Malinau Selatan Hulu	2

8.	Mentarang Hulu	4
9.	Sungai Tubu	3
10.	Kayan Hulu	5
11.	Kayan Selatan	5
12.	Kayan Hilir	4
13.	Sungai Boh	2
14.	Pujungan	5
15.	Bahau Hulu	-
	Jumlah	74

Sumber : Bidang Pembangunan Ekonomi Masyarakat dan TTG, 2020

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah.

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis. Analisis capaian indikator kinerja sasaran strategis sebagai bahan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	Tahun 2020 %
1	2	3	4	5
Persenatse Desa yang memimilki Profil Desa	%	90%	88%	98%
Persentase Desa yang Menyusun APBDes Tepat Waktu	%	100%	100%	100%

1. Persentase Desa yang memimilki Profil Desa

Pada tabel di atas, pencapaian sasaran meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dengan indikator persentase Desa yang memiliki Profil Desa untuk tahun 2020 ditargetkan dalam dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau tahun 2016-2021 adalah 90 %. Pada

tahun 2020 realisasi dari persentase Desa yang Memiliki Profil Desa mencapai 88% dengan capaian kinerja sebesar 98% dari target dimana terdapat kenaikan 7%.

2. Persentase Desa yang Menyusun APBDes Tepat Waktu

Pada tabel di atas, pencapaian sasaran meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dengan indikator persentase Desa yang Menyusun APBDes Tepat Waktu untuk tahun 2020 ditargetkan dalam dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau tahun 2016-2021 adalah 100 %. Pada tahun 2020 realisasi dari persentase Desa yang Menyusun APBDes Tepat Waktu mencapai 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target.

Tabel 1.2

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pelayanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Membangun Desa

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	Tahun 2020 %
1	2	3	4	5
Persentase partisipasi masyarakat yang aktif dalam Musrenbang	%	94%	89%	98%
Persentase BUMDes yang aktif	%	90 %	94 %	98%

1. Persentase partisipasi masyarakat yang aktif dalam Musrenbang

Pada tabel di atas, pencapaian sasaran meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pelayanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Membangun Desa dengan indikator Persentase partisipasi masyarakat yang aktif dalam Musrenbang untuk tahun 2020 ditargetkan dalam dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau tahun 2016-2021 adalah 94 %. Pada tahun 2020 realisasi dari persentase partisipasi masyarakat yang aktif dalam Musrenbang mencapai 89 % dengan capaian kinerja sebesar 98 % dari target dimana terdapat kenaikan 9 %.

2. Persentase BUMDes yang aktif

Pada tabel di atas, pencapaian sasaran meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pelayanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Membangun Desa dengan indikator Persentase BUMDes yang aktif untuk tahun 2020 ditargetkan dalam dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau tahun 2016-2021 adalah 90 %. Pada tahun 2020 realisasi dari persentase BUMDes yang aktif mencapai 94 % dengan capaian kinerja sebesar 98 % dari target dimana terdapat kenaikan 9 %.

Adapun rumusan yang di gunakan untuk menghitung analisis atas capaian di atas yaitu :

$\frac{\text{Jumlah desa yang memiliki Profil}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100$
$\frac{\text{Jumlah desa yang menyusun APBDes tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100$
$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang aktif}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$
$\frac{\text{Jumlah BUMDes yang aktif}}{\text{Jumlah BUMDes}} \times 100$

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2018 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2020 Vs Tahun		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Desa yang memiliki Profil Desa	%	98%	-	73,39	90	-	74,89	91,83
Persentase Desa yang Menyusun APBDes Tepat Waktu	%	100%	-	100%	100%	-	100%	100%
Persentase partisipasi	%	98	-	73,39	94	-	16,33	104,24

masyarakat yang aktif dalam Musrenbang								
Persentase BUMDes yang aktif	%	94	-	-	85	-	-	90,42

Berdasarkan Tabel 3.6 di atas tampak bahwa realisasi kinerja terhadap indikator persentase Desa yang memiliki Profil Desa telah mengalami peningkatan yakni dari tahun 2018 senilai 73,39 % di tahun 2019 senilai 90% hingga pada tahun 2020 mencapai 98% hal ini mengalami peningkatan dengan capaian kinerja yang dicapai.

realisasi kinerja terhadap indikator persentase Desa yang Menyusun APBDes Tepat Waktu telah mengalami peningkatan yakni dari tahun 2018 senilai 100 % di tahun 2019 senilai 100% hingga pada tahun 2020 mencapai 100 % hal ini berbanding lurus dengan capaian kinerja yang dicapai.

realisasi kinerja terhadap indikator persentase partisipasi masyarakat yang aktif dalam Musrenbang telah mengalami peningkatan yakni dari tahun 2018 senilai 73,39 % di tahun 2019 senilai 94 % hingga pada tahun 2020 mencapai 98 % hal ini berbanding lurus dengan capaian kinerja yang dicapai.

realisasi kinerja terhadap indikator persentase BUMDes yang aktif telah mengalami peningkatan yakni dari tahun 2019 senilai 85 % hingga pada tahun 2020 mencapai 94 % hal ini berbanding lurus dengan capaian kinerja yang dicapai.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Pada tahun 2020 realisasi dari persentase Desa yang memiliki Profil Desa mencapai 90% dengan capaian kinerja sebesar 98% dari target. realisasi dari Persentase Desa yang Menyusun APBDes Tepat Waktu mencapai 100% dengan capaian Kinerja 100%, realisasi dari Persentase partisipasi masyarakat yang aktif dalam Musrenbang mencapai 94% dengan capaian Kinerja 98%, realisasi dari Persentase BUMDes yang aktif mencapai 94% dengan capaian Kinerja 98%,

Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melebihi target yang telah ditentukan karena ada beberapa upaya percepatan yang dilakukan mulai dari penyusunan program hingga pelaksanaan yaitu:

- a. Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak stakeholders.
- b. Dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah yakni APBD .
- c. Penyiapan dokumen *readiness criteria* (dokumen perencanaan teknis, DED, RAB yang dilakukan pada tahun sebelumnya).
- d. Komitmen dan penekanan pimpinan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk melakukan strategi percepatan pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing PPK/PPTK.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memiliki Profil Desa	98%	-	-
	Persentase Desa yang Menyusun APBDes Tepat Waktu	100%	Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa - Evaluasi Raperdes	98%

			tentang APBDes	
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pelayanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Membangun Desa	Persentase partisipasi masyarakat yang aktif dalam Musrenbang	98%	Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa - Penunjang musyawarah perencanaan pembangunan Desa	100%
	Persentase BUMDes yang aktif	98%	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan - Pembentukan dan pembinaan BUMDes dan BUMDes bersama	99,92%

Sumber : Subbag. Penyusunan Program Dinas PUPR Perkim, 2020

Dari tabel di atas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh beberapa program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2020 capaian indikator kinerja Persentase Desa yang memiliki Profil Desa, Persentase Desa yang Menyusun APBDes Tepat Waktu, Persentase partisipasi masyarakat yang aktif dalam Musrenbang, Persentase BUMDes yang aktif 394%. Adapun program dan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut di atas adalah Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa, dengan kegiatan Evaluasi Raperdes tentang APBDes, Penunjang musyawarah perencanaan pembangunan Desa, Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, Pembentukan dan pembinaan BUMDes dan BUMDes bersama dengan sumber pendanaan dari APBD. Pelaksanaan 3 kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa dan Peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan, peningkatan tersebut telah meningkatkan kondisi Profil Desa, Penyusunan APBDes tepat waktu, tingkat kehadiran masyarakat mengikuti musrenbangdes dan BUMDes yang aktif.

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi SDM khususnya SDM Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam melaksanakan tugasnya tergolong cukup atau sedang yakni dengan melihat tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan dimana jenjang pendidikan tinggi S1 hingga S2 masih rendah meskipun demikian efektivitas SDM cukup memuaskan yakni dengan melihat penurunan pelanggaran yang dilakukan dan insentif yang diterima sehingga pencapaian kinerja kegiatan dapat berjalan dengan baik.

1. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

Berdasarkan diagram di atas, tampak bahwa rencana pagu anggaran pada Tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan rencana pagu anggaran Tahun 2019. Hal ini terjadi karena adanya penghematan yakni dari Rp 12.316.264.404.00 menjadi Rp 11.059.809.392 atau sekitar 1%. Meskipun demikian, realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2020 yakni 97,39% lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang 95,80%.

2. Perbandingan Penyerapan Anggaran Per-Bulan

Adapun dalam hal penyerapan anggaran, terdapat beberapa hambatan pada semester pertama di tahun 2020, dimana satuan kerja belum sepenuhnya dapat menyerap anggaran kecuali untuk anggaran operasional sampai dengan rasionalisasi anggaran selesai. Disamping itu penetapan APBD Perubahan yang baru selesai pada triwulan empat yakni tepatnya dibulan Oktober dengan nomenklatur yang baru dan diikuti dengan proses administrasi lanjutan (penetapan SDM pelaksana) telah berimplikasi pada keterlambatan penyerapan anggaran.

Penyerapan anggaran efektif per bulan yaitu terhitung sejak bulan Agustus sampai Desember 2020. Rata-rata penyerapan per bulan pada tahun 2020 tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata penyerapan tahun 2019.

Berikut dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan:

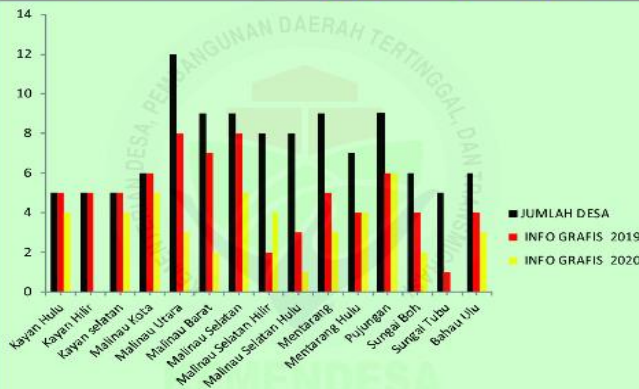
a.

b. DOKUMENTASI SARANA PUBLIKASI APBDES 2020

NEW RELEASE INFO GRAFIS APBDesa Tahun Anggaran 2020 KAB. MALINAU



UPDATE : Tanggal 29 September 2020, Jam 14.38 Wita



GRAFIK PERKEMBANGAN PEMASANGAN INFORMASI GRAFIS DESA BERDASARKAN KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020



1. Kayan Hulu : 4 Desa
2. Kayan Hilir : 0 Desa
3. Kayan Selatan : 4 Desa
4. Malinau Kota : 5 Desa
5. Malinau Utara : 3 Desa
6. Malinau Barat : 2 Desa
7. Pujungan : 6 Desa
8. Sungai Boh : 2 Desa
9. Mentarang : 3 Desa
10. Mentarang Hulu : 4 Desa
11. Malinau Selatan : 5 Desa
12. Sungai Tubu : 0 Desa
13. Bahau Ulu : 3 Desa
14. MASEHU : 1 Desa
15. MASEHI : 4 Desa

PERKEMBANGAN PEMASANGAN INFO GRAFIS DESA 2020									
KECAMATAN	KODE DESA	DESA	BELUM ADA	SUDAH PASANG	KECAMATAN	KODE DESA	DESA	BELUM ADA	SUDAH PASANG
Mentarang	8502012001	Long Galid	v		Malinau Barat	8502082001	Long Itila	v	
Mentarang	8502012002	Long Bisu	v	v	Malinau Barat	8502082002	Long Kampil	v	
Mentarang	8502012003	Tanulayang	v		Malinau Barat	8502082003	Punan Bengalon	v	
Mentarang	8502012004	Long Uku	v		Malinau Barat	8502082004	Sesua	v	
Mentarang	8502012005	Pulau Sapi	v	v	Malinau Barat	8502082005	Sentaban	v	
Mentarang	8502012006	Pakng	v		Malinau Barat	8502082006	Temung Leparng	v	
Mentarang	8502012007	Lidung Kemend	v	v	Malinau Barat	8502082007	Taras	v	
Mentarang	8502012008	Mentarang Baru	v		Malinau Barat	8502082008	Kuala Lapang	v	
Mentarang	8502012009	Harauq Meis	v		Malinau Barat	8502082009	Samboang	v	
Malinau Kota	8502022001	Batu Liding	v		Sungai Boh	8502092001	Duma Mahak	v	
Malinau Kota	8502022002	Malinau Kota	v	v	Sungai Boh	8502092002	Long Lebusan	v	
Malinau Kota	8502022003	Pulau Salawan	v		Sungai Boh	8502092003	Mahak Baru	v	
Malinau Kota	8502022004	Malinau Hulu	v	v	Sungai Boh	8502092004	Long Top	v	
Malinau Kota	8502022005	Malinau Hillir	v		Sungai Boh	8502092005	Agung Baru	v	
Malinau Kota	8502022006	Longun Geranjene	v		Sungai Boh	8502092006	Duta Baru	v	
Pujungan	8502032001	Long Pujungan	v	v	Cayan Selatan	8502102001	Long Ampiang	v	
Pujungan	8502032002	Long Ketaman	v		Cayan Selatan	8502102002	Long Ura	v	
Pujungan	8502032003	Long Dasa	v	v	Cayan Selatan	8502102003	Lidung Pakau	v	
Pujungan	8502032004	Long Lama	v	v	Cayan Selatan	8502102004	Sungai Barong	v	
Pujungan	8502032005	Long Jafet	v		Cayan Selatan	8502102005	Metilang	v	
Pujungan	8502032006	Long Aras	v		Bahau Hulu	8502112001	Long Ili	v	
Pujungan	8502032007	Long Poliran	v		Bahau Hulu	8502112002	Long Alango	v	
Pujungan	8502032008	Long Bena	v	v	Bahau Hulu	8502112003	Long Bereni	v	
Kayan Hulu	8502042001	Helia Bera	v	v	Bahau Hulu	8502112004	Long Tebulu	v	
Kayan Hulu	8502042002	Long Pipa	v		Bahau Hulu	8502112005	Awai Ping	v	
Kayan Hulu	8502042003	Long Sula	v		Bahau Hulu	8502112006	Long Kemuat	v	
Kayan Hilir	8502042004	Sungai Anai	v		Mentarang Hulu	8502122001	Long Fala	v	
Kayan Hilir	8502042005	Long Mecun	v		Mentarang Hulu	8502122002	Long Keliwu	v	
Kayan Hulu	8502052001	Long Nawaib	v		Mentarang Hulu	8502122003	Lung Mekatip	v	
Kayan Hulu	8502052002	Nawang Baru	v	v	Mentarang Hulu	8502122004	Lung Sruau	v	
Kayan Hulu	8502052003	Long Temipat	v	v	Mentarang Hulu	8502122005	Luna Barang	v	
Kayan Hulu	8502052004	Long Beteik	v		Mentarang Hulu	8502122006	Long Silit	v	
Kayan Hilir	8502052005	Long Pasayau	v	v	Mentarang Hulu	8502122007	Lung Semamu	v	
Malinau Selatan	8502062001	Hulu Bekayak	v		Malinau Selatan Hilir	8502132001	Sebatang	v	
Malinau Selatan	8502062002	Long Lench	v		Malinau Selatan Hilir	8502132002	Sebatang	v	
Malinau Selatan	8502062003	Longop	v	v	Malinau Selatan Hilir	8502132003	Punan Sebatang	v	
Malinau Selatan	8502062004	Laban Nyarit	v	v	Malinau Selatan Hilir	8502132004	Batu Rajang	v	
Malinau Selatan	8502062005	Manak Tanah Kibang	v	v	Malinau Selatan Hilir	8502132005	Sungai Sokok	v	
Malinau Selatan	8502062006	Pelesau	v		Malinau Selatan Hilir	8502132006	Punan Gong Sokok	v	
Malinau Selatan	8502062007	Paya Seturan	v		Malinau Selatan Hilir	8502132007	Long Adia	v	
Malinau Selatan	8502062008	Punan Biau	v		Malinau Selatan Hilir	8502132008	Punan Long Adia	v	
Malinau Selatan	8502062009	Songangan	v		Malinau Selatan Hulu	8502142001	Long Lake	v	
Malinau Utara	8502072001	Kalamok	v	v	Malinau Selatan Hulu	8502142002	Punan Mirau	v	
Malinau Utara	8502072002	Long	v		Malinau Selatan Hulu	8502142003	Long Rak	v	
Malinau Utara	8502072003	Malinau Sebarang	v		Malinau Selatan Hulu	8502142004	Helange	v	
Malinau Utara	8502072004	Pulau	v		Malinau Selatan Hulu	8502142005	Metat	v	
Malinau Utara	8502072005	Selap	v		Malinau Selatan Hulu	8502142006	Long Jabat	v	
Malinau Utara	8502072006	Senyemp	v		Malinau Selatan Hulu	8502142007	Nabarasmo	v	
Malinau Utara	8502072007	Mepeun Tubu	v		Malinau Selatan Hulu	8502142008	Temung Naraga	v	
Malinau Utara	8502072008	Belayan	v		Sungai Tubu	8502152001	Long Masu	v	
Malinau Utara	8502072009	Sompaik Warod	v		Sungai Tubu	8502152002	Long Ite	v	
Malinau Utara	8502072010	Lubak Manis	v	v	Sungai Tubu	8502152003	Long Ramau	v	
Malinau Utara	8502072011	Kelapis	v		Sungai Tubu	8502152004	Rian Tubu	v	
Malinau Utara	8502072012	Semangas	v		Sungai Tubu	8502152005	Long Pada	v	

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Publikasi Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Sarana Publikasi Prioritas penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho; 2. papan informasi Desa; 3. media elektronik; 4. media cetak; 5. media sosial;
6. website Desa; 7. selebaran (*leaflet*); 8. pengeras suara di ruang publik; 9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa. Apabila Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber | Permendesa Nomor 11 Tahun 2019

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Malinau

c.

INFO GRAFIK APBDes Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota

PENDAPATAN
Data Desa (DDS)
Cerdema (COM)
RT Bersih (R3)
Pendapatan Giro BANK (DLL)
Silpa Tahun 2019 Data Desa
Silpa Tahun 2019 RT Bersih
Total Pendapatan

Rp. 4.779.953.000,00
Rp. 547.556.000,00
Rp. 5.200.000.000,00
Rp. 20.206.247,00
Rp. 337.240.080,00
Rp. 174.370.000,00
Rp. **11.059.325.327,00**

RIEMANTAI NAJAMUDIN
Kepala Desa Malinau Kota

BELAKA	Anggaran	Sumber dana	Keterangan	Rp.	Kode
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA					
Penyusunan Bidang Silpa, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp. 2.103.780.000,00				ADD
Penyediaan Kegiatan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 36.000.000,00				ADD
Pembinaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 282.758.000,00				ADD
Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (JTK, Honor PAKUD dan PPKD dll)	Rp. 128.000.000,00				ADD
Penyediaan Tunjangan BPD	Rp. 15.000.000,00				ADD
Penyediaan Operasional BPD (Pasar, ATK, Maki, Micon, Pakan Seragan, Labrak dll)	Rp. 23.000.000,00				ADD
Penyediaan Measini/Operasional RT/BW	Rp. 220.000.000,00				ADD
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Rp. 277.238.000,00				ADD
Penyediaan Sarana (Jasa) (Jasa) Perantara Pemerintahan	Rp. 180.000.000,00	ADD, DLL			
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dl) (pilih)	Rp. 97.232.000,00	ADD, DSS			
Pengadaan Administrasi (Kendaraan, Peralatan, Sph) (Sewa) dan Keasapik	Rp. 255.000.000,00				ADD
Pengurusan, Perawatan, dan Pemeliharaan Prati Desa (Dipilih)	Rp. 66.000.000,00	DSS			
Pengadaan Administrasi dan Keasapik Pemerintahan Desa	Rp. 90.000.000,00	ADD, DSS			
Penyenggaraan Jasa Prati Pemerintahan, Perawatan, Keasapik dan Pelaporan	Rp. 590.735.000,00				ADD
Penyenggaraan Muparabir Perencanaan Desa (Pembahasan APBDes (Reguler)	Rp. 100.000.000,00	ADD, DSS			
Penyenggaraan Musyawirah Desa Lainnya (Musdas, rambing desa Non Reguler)	Rp. 60.000.000,00	DSS			
Penyusunan Dokumen Keasapik Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPT dll)	Rp. 75.375.000,00	DSS			
Pengembangan Sistem Informasi Desa	Rp. 50.000.000,00	DSS			
Kontrol/Keparama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Rp. 95.000.000,00	DSS			
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp. 1.440.000.000,00				
Sub Bidang Pendidikan	Rp. 99.775.000,00				
Penyenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Rp. 268.950.000,00	ADD, DSS			
Pemeliharaan Sarana Prasarana Penguasaan Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Rp. 58.735.000,00	ADD, DSS			
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Wat Peraga	Rp. 70.670.000,00	DSS			
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin Berprestasi	Rp. 185.420.000,00	ADD			
Sub Bidang Kesehatan	Rp. 743.895.550,00				
Penyenggaraan Posandu (Min Tambahan, Ite Bumi, Lamsia, Isentif)	Rp. 316.667.000,00	ADD, DSS			
Penyuluhan dan Peleatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Rp. 109.320.755,00	ADD, DSS			
Penyenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp. 92.500.000,00	DSS			
Pembinaan dan Penguasaan Upaya Kesehatan Tradisional	Rp. 15.500.000,00	DSS			
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posandu/Palindes/PWD "	Rp. 208.571.755,00	DSS			
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang	Rp. 1.076.572.550,00				
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Cang	Rp. 120.500.000,00	ADD			
Pemeliharaan Monumen Cagar/Batas Desa	Rp. 55.800.000,00	ADD			
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Rp. 210.500.000,00	ADD			
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	Rp. 438.339.000,00	DSS			
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp. 1.076.572.550,00				
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Rp. 597.790.000,00	ADD, DSS			
Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Rp. 12.000.000,00	ADD			
Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Carang-garang, Selokan, Parit dll) (Prasarana Jalan)	Rp. 199.234.000,00	ADD, DSS			
Pemeliharaan Fasilitas Tamban Umum (MCK Umum dll)	Rp. 715.160.000,00	ADD			
Pemeliharaan Fasilitas Pengisian Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Rp. 42.000.000,00	ADD			
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	Rp. 10.000.000,00	DSS			
Sub Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Rp. 54.250.000,00				
Pengembangan Lingkungan Hidup Milik Desa	Rp. 54.250.000,00	DSS			
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 15.000.000,00				
Pertemuan dan Pengiriman Sarung/Material Komunikasi dan Informatika Lokal Desa	Rp. 15.000.000,00	DSS			
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Rp. 50.000.000,00				
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif (Desa	Rp. 50.000.000,00	ADD			
Sub Bidang Pariwisata	Rp. 250.000.000,00				
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Rp. 250.000.000,00	DSS			
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Rp. 3.538.371.000,00				
Sub Bidang Kekerabatan, Ketertarikan Umum dan Perindungan Masyarakat	Rp. 430.770.000,00				
Pengadaan Penyelenggaraan Per Keamanan Desa	Rp. 2.480.200.000,00				
Sub Bidang Kekerabatan dan Masyarakat	Rp. 187.000.000,00	ADD, DSS			
Pembinaan Group Kekerabatan dan Kebudayaan Tingkat Desa	Rp. 90.000.000,00	DSS			
Pengiriman Kontingen Group Kekerabatan & Kebudayaan (Wakil Desa) (Jasa) (Kul) (Kul)	Rp. 1.081.540.000,00	ADD, DSS			
Penyenggaraan Festival Kekerabatan, Adat/Kepercayaan, dan Kegiatan (HUT W, Raya Kesagamaan dll)	Rp. 444.990.000,00	ADD, DSS			
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Kebudayaan (Rumah Adat, Lapangan Milik Desa dll)	Rp. 103.840.000,00				
Sub Bidang Kepedulian dan Olahraga	Rp. 713.400.000,00	ADD, DSS			
Penyenggaraan Festival/Lomba Kepedulian dan Olahraga Tingkat Desa	Rp. 68.500.000,00	ADD			
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepedulian & Olahraga Milik Desa	Rp. 232.200.000,00				
Sub Bidang Keperawatan dan Olahraga	Rp. 140.000.000,00	DSS			
Pembinaan PKK	Rp. 140.000.000,00	DSS			
Pelatihan Pembinaan Lomba Masyarakat	Rp. 60.000.000,00	ADD, DSS			
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp. 670.150.000,00				
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp. 15.000.000,00				
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Perabuan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Rp. 35.000.000,00	ADD			
Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan dll)	Rp. 100.000.000,00	ADD			
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp. 322.440.000,00				
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (jati produksi/pengelolaan/pengalangan)	Rp. 123.440.000,00	ADD			
Peningkatan Produksi Peternakan (jati produksi/pengelolaan/kandang)	Rp. 44.500.000,00	ADD			
Pemeliharaan Sauran Irigasi Tersier/Sederhana	Rp. 100.350.000,00	DSS			
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp. 771.950.000,00				
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp. 771.950.000,00	DSS			
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp. 57.000.000,00				
Pembangunan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Rp. 57.000.000,00	ADD			
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp. 57.000.000,00				
Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa/Kios Milik Desa	Rp. 57.000.000,00	DSS			
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	Rp. 410.250.000,00				
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 410.250.000,00				
Kegiatan Penanggulangan Bencana	Rp. 410.250.000,00	DSS			
Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp. 0,00				
Penganganan Keadaan Mendesak	Rp. 0,00	ADD, DSS			

d.



PENDAPATAN TRANSFER

DANA DESA	Rp 1,084,348,000.00
DANA RT BERSIH	Rp 260,000,000.00
DANA GERDEMA	Rp 511,556,000.00

Jumlah Pendapatan Transfer Tahun 2020 **Rp 1,855,904,000.00**

SILPA TAHUN 2019

DANA DESA	Rp 108,794,979.00
DANA RT BERSIH	Rp 62,525,000.00

Jumlah Silpa Tahun 2019 **Rp 171,319,979.00**

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 648,260,000.00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp 1,104,337,979.00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Rp 99,906,000.00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp 98,860,000.00
BIDANG PENANGGULANGAN BENBCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	Rp 75,860,000.00

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Rp 648,260,000.00

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa	Rp 36,000,000.00
2. Tunjangan Aparat Desa	Rp 172,356,000.00
3. Tunjangan LPM	Rp 66,600,000.00
4. Tunjangan Adat	Rp 21,600,000.00
5. Operasional Kantor Desa	Rp 50,000,000.00
6. Operasional PKK	Rp 36,000,000.00
7. Operasional LPM	Rp 23,000,000.00
8. Operasional Posyandu	Rp 10,000,000.00
9. Operasional Adat	Rp 5,000,000.00
10. Operasional Karang Taruna	Rp 5,000,000.00
11. Tunjangan BPD	Rp 45,000,000.00
12. Operasional BPD	Rp 23,000,000.00
13. Insentif RT Bersih	Rp 35,400,000.00
14. Operasional RT Bersih	Rp 24,600,000.00
15. Tunjangan Operatos SisKeduDes	Rp 18,000,000.00
16. Pengadaan Mesin Ketinting	Rp 24,000,000.00
17. Pengadaan Ambulance Sungai	Rp 34,280,000.00
18. Pengadaan Senso 382	Rp 13,424,000.00
19. Biaya Musrenbang	Rp 5,000,000.00

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Rp 1,104,337,979.00

1. Bantuan Beasiswa Kurang Mampu	Rp 21,500,000.00
2. Pembangunan Dapur Pustu 4 X 6 Meter	Rp 82,203,000.00
3. Pemeliharaan Mess Desa	Rp 7,920,000.00
4. Pembangunan Jembatan Gilingan Padi	Rp 39,065,000.00
5. Pembangunan Gedung Desa 8 X 12 Meter	Rp 280,710,979.00
6. Pembangunan Rumah Penduduk Kurang Mampu 6X8 Meter (5 Buah)	Rp 511,825,000.00
7. Pengadaan Papan Nama Tiap KK (14 Buah)	Rp 2,170,000.00
8. Pengadaan Mesin Molen	Rp 68,944,000.00
9. Pengadaan Lampu Jalan (13 Unit)	Rp 90,000,000.00

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Promosi Potensi Desa	Rp 40,356,000.00
2. Hari Besar Keagamaan	Rp 29,550,000.00
3. Wawasan Kebangsaan	Rp 30,000,000.00

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Pengadaan Mesin Perontak Padi (1 Unit)	Rp 20,000,000.00
2. Pengadaan Mesin Rumput (2 Unit)	Rp 8,000,000.00
3. Pengadaan Hensplayer (2 Unit)	Rp 6,000,000.00
4. Pembangunan Rumah Gilingan Padi 4X6 Meter	Rp 64,860,000.00

BIDANG PENANGGULANGAN BENBCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

1. Penanggulangan Bencana	Rp 14,600,000.00
2. Penerimaan Bantuan Sembako	Rp 23,460,000.00
3. Penerimaan Bantuan Langsung Tunai BLT-DD (6 Bulan)	Rp 37,800,000.00





APBDes Perubahan DESA LANGAP KECAMATAN MALINAU SELATAN Tahun Anggaran 2020

REKAPITULASI DAFTAR PENDAPATAN		PENDAPATAN	
Saluran Dana Desa	Rp. 3.935.085.000		
Dana Desa	Rp. 1.603.529.000		
GerdeMa	Rp. 511.556.000		
RT Bersih	Rp. 1.820.000.000		
TOTAL PENDAPATAN	Rp. 3.935.085.000		

REKAPITULASI DAFTAR PENGELUARAN		
NO	KATEGORI	JENJANG
1	Saluran Dana Desa	Rp. 3.935.085.000
2	Dana Desa	Rp. 1.603.529.000
3	GerdeMa	Rp. 511.556.000
4	RT Bersih	Rp. 1.820.000.000
TOTAL		Rp. 3.935.085.000

REKAPITULASI DAFTAR PENGELUARAN (lanjutan)		
NO	KATEGORI	JENJANG
1	Saluran Dana Desa	Rp. 3.935.085.000
2	Dana Desa	Rp. 1.603.529.000
3	GerdeMa	Rp. 511.556.000
4	RT Bersih	Rp. 1.820.000.000
TOTAL		Rp. 3.935.085.000

SAYA ADA UJUNG SEMANGAT
BERSAMA LITA PASTI BISA



Pendapatan Desa
Pendapatan Transfer
 Dana Desa
 Alokasi Dana Gerdema
 Alokasi Dana RT Bersih
 Silpa Giro Bank
 Sisa Lebih (Silpa) Penghitungan
 Anggaran Tahun Sebelumnya

Rp.2.537.130.905
Rp.2.511.836.000
 Rp.1.480.280.000
 Rp.511.556.000
 Rp.520.000.000
 Rp.4.994.905
 Rp.20.300.000

Belanja Desa
 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
 Bantuan Langsung Tunai (BLT-Desa)
 Pengurangan Dana Desa

Rp.2.537.130.905
 Rp.690.150.905
 Rp.1.533.853.000
 Rp.62.020.000
 Rp.126.412.000
 Rp.94.988.000
 Rp.18.900.000
 Rp.10.807.000

NO	URAIAN	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah			Rp.690.150.905
A.1	Tunjangan Kepala Desa	GERDEMA	1. Tahun	Rp.36.000.000
A.2	Tunjangan Perangkat Desa	GERDEMA	1. Tahun	Rp.260.556.000
A.3	Insentif Operator Siskaudes	GERDEMA	1. Tahun	Rp.18.000.000
A.4	Kegiatan OPS Perangkat Desa	GERDEMA	1. Tahun	Rp.133.994.905
A.5	Kegiatan OPS BPD	GERDEMA	1. Tahun	Rp.23.000.000
A.6	Tunjangan BPD	GERDEMA	1. Tahun	Rp.45.000.000
A.7	Kegiatan OPS RT 1 dan RT 2	RT BERSIH	1. Tahun	Rp.120.000.000
A.8	Pengadaan Camera RT 2	RT BERSIH	1. Unit	Rp.3.000.000
A.9	Pengadaan KWH Listrik RT 1	RT BERSIH	1. Unit	Rp.5.000.000
A.10	Pengadaan Pompa Air (dap) RT 1	RT BERSIH	20. Unit	Rp.10.000.000
A.11	Pengadaan Pompa Air (dap) RT 2	RT BERSIH	10. Unit	Rp.5.000.000
A.12	Kegiatan Musranbang RT 1 dan RT 2	RT BERSIH	1. Keg	Rp.10.000.000
A.13	Kegiatan Musdes	DDS	1. Keg	Rp.10.000.000
A.14	Kegiatan LKPPDes	DDS	1. Keg	Rp.10.000.000
A.15	Infografik Desa	DDS	1. Keg	Rp.600.000
B.	Pelaksanaan Pembangunan Desa			Rp.1.533.853.000
B.1	Insentif Guru PAUD	DDS	1. Tahun	Rp.36.000.000
B.2	Insentif Guru Sekolah Hari Minggu	DDS	1. Tahun	Rp.24.000.000
B.3	Pengadaan Soragam PAUD	DDS	1. Keg	Rp.10.000.000
B.4	Insentif Pengelola TBM	DDS	1. Tahun	Rp.8.600.000
B.5	Pengelolaan Kesehatan Stunting	DDS	1. Keg	Rp.24.156.000
B.6	Pengadaan Alat Posbindu RT 1, RT 2	RT BERSIH	1. Keg	Rp.10.000.000
B.7	Pem Gedung Posyandu	DDS	6X10 Mtr	Rp.86.960.000
B.8	Pembangunan Gorong-gorong	DDS	10 Unit	Rp.102.275.000
B.9	Pembukaan Jl Usaha Tani	DDS	5300 Mtr	Rp.408.943.000
B.10	Pembangunan Jalan Semenisasi	DDS	270X3Mtr	Rp.214.300.000
B.11	Pembangunan Jembatan Ulin	DDS	12X3 Mtr	Rp.34.079.000
B.12	Pembangunan Gedung Serbaguna	DDS	12X28Mtr	Rp.400.040.000
B.13	Pengadaan Seng RT 2	RT BERSIH	450 Lbr	Rp.27.000.000
B.14	Pengadaan Pangelatan Rumah Warga RT 1	RT BERSIH	1 Paket	Rp.38.880.000
B.15	Pengadaan Pangelatan Rumah Warga RT 2	RT BERSIH	1 Paket	Rp.55.000.000
B.16	Sanitasi Lingkungan RT 2	RT BERSIH	150 Mtr	Rp.13.000.000
B.17	Pembangunan Penutup Bak Air Bersih	DDS	1. Keg	Rp.3.620.000
B.18	Pembangunan Sumur Bor RT 1	RT BERSIH	10 Unit	Rp.35.000.000
C.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa			Rp.62.020.000
C.1	Promosi Seni dan Budaya	DDS	1. Keg	Rp.10.000.000
C.2	Seni dan Budaya RT 1 dan RT 2	RT BERSIH	1. Keg	Rp.10.000.000
C.3	Hari Keagamaan RT 1	RT BERSIH	1. Keg	Rp.15.020.000
C.4	Hari Keagamaan RT 2	RT BERSIH	1. Keg	Rp.12.000.000
C.5	Pembinaan Pemuda dan Olahraga	DDS	1. Keg	Rp.10.000.000
C.6	Hui RI RT 1	RT BERSIH	1. Keg	Rp.5.000.000
D.	Pemberdayaan Masyarakat Desa			Rp.126.412.000
D.1	Pengadaan Tangki Sampot dan Racun RT 1	RT BERSIH	1 Paket	Rp.65.800.000
D.2	Pengadaan Racun Rumpul RT 2	RT BERSIH	1 Paket	Rp.60.612.000

DOKUMENTASI



i.



INFO GRAFIS APBD DES PERUBAHAN 2020 DESA SEMPAYANG



KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pendapatan Transfer	2,435,975,000
Dana Desa	1,144,419,000
Alokasi Dana Desa	
- Gerdema	511,556,000
- RT Bersih	780,000,000
Pengurangan (Dana Desa)	10,807,000

DANA GERDEMA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	
Tunjangan Kepala Desa	36,000,000
Tunjangan Aparat Desa	172,356,000
Tunjangan Pengurus LPM	66,600,000
Tunjangan Pengurus Lembaga ADAT	21,600,000
Operasional Kantor Desa	50,000,000
Operasional LPM	23,000,000
Operasional PKK	36,000,000
Operasional Posyandu Balita	10,000,000
Operasional Karang Taruna	5,000,000
Operasional Lembaga ADAT	5,000,000
Tunjangan Keudukan BPD	45,000,000
Operasional BPD	23,000,000
Tunjangan Operator Siskeudes	18,000,000

DANA RT BERSIH

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	
Tunjangan Pengurus RT 1	35,400,000
Operasional RT 1	24,600,000
Tunjangan Pengurus RT 2	35,400,000
Operasional RT 2	24,600,000
Tunjangan Pengurus RT 3	35,400,000
Operasional RT 3	24,600,000
Musrenbang RT 1	3,500,000
Musrenbang RT 2	3,000,000
Musrenbang RT 3	5,000,000
Penyampaian LKPJ RT 1	4,000,000
Penyampaian LKPJ RT 2	4,000,000
Penyampaian LKPJ RT 3	5,000,000

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
Pengadaan Perengkapan Sekolah Anak RT 2	10,000,000
Pengadaan Tas Sekolah SMP-SMA RT 3	10,000,000
Pengadaan Tas Sekolah anak PAUD RT 3	10,000,000
Kegiatan Kader Jumantik RT 1	6,720,000
Percetakan Sawah RT 1	55,000,000
Pembangunan Parit Santiasi RT 2	50,000,000
Semerisasi Jalan RT 3	35,000,000
Lanjutan Drainase RT 1	70,000,000
Pengadaan HT RT 1	2,000,000
Pengadaan Tiang Listrik RT 3	48,000,000

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
Pembangunan Poskamling RT 3	5000000
Pembangunan Poskamling RT 1	10780000
Wawasan Kebangsaan RT 2	3000000
Perayaan Tahun Baru RT 2	5000000
Promosi Potensi RT 2	5000000
Kegiatan HUT RI RT 3	3000000
Promosi Potensi RT 3	7000000
Promosi Potensi RT 1	6000000
Pengadaan HUT RI RT 1	

Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
Pengadaan Mesin Rumpuk RT 2	53340000
Pengadaan Gerobak RT 3	2000000
Pengadaan Racun Rumpuk RT 2	16660000
Pengadaan Mesin dan Perengkapan Gilingan Mie RT 3	5000000
Pelatihan Mejahit RT 3	5000000
Pelatihan Memasak RT 3	5000000
Pelatihan Percetakan Batako RT 3	5000000

Bidang Bencana Alam	
Kegiatan Penanggulangan Bencana RT 1	40000000
Kegiatan penanggulangan Bencana RT 2	50000000
Kegiatan Penanggulangan Bencana RT 3	50000000

DANA DESA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		37,000,000
Penyelenggaraan Musyawarah Desa		7,000,000
Penyusunan APBDes Ta.2020		5,000,000
Penyusunan Produk Hukum Desa		5,000,000
Penyusunan LPPDes dan LKPDes		15,000,000
Penyusunan Profile Desa		5,000,000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		580,798,200
Operasional PAUD Harapan Indah		29,200,000
Insentif Kader Posyandu Balita dan Lansia		36,000,000
Insentif Kader Pos Hindu		18,000,000
Insentif Kader KPM		5,400,000
Makanan Tambahan Burmil		10,000,000
Makanan Tambahan Lansia dan Balita		20,000,000
Operasional Kader KPM		21,500,000
Operasional Kader Posyandu Balita dan Lansia		16,038,000
Perlengkapan Posyandu		15,000,000
Alat Kesehatan Posyandu		4,000,000
Pemasangan KWH Posyandu		9,562,000
Pembangunan Penampungan Air Posyandu		116,379,800
Pembangunan Turap Jembatan Gantung		63,627,500
Pembangunan Box/Slap Culvert dalam Desa		126,264,600
Pembangunan Drainase RT 2 (DD)		36,826,300
Pembangunan Drainase dan Prejong RT 1		15,000,000
Pembangunan Taman Hatinya PKK		10,000,000
Pembangunan Pos Informasi Desa		8,000,000
Perlengkapan Pos Informasi Desa		8,000,000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		110,000,000
Festival Kesenian, Adat dan Budaya		50,000,000
Promosi Potensi Desa		10,000,000
Festival Keagamaan		30,000,000
Wawasan Kebangsaan Desa		10,000,000
Lomba RT Bersih		10,000,000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		299,493,000
Pengadaan Ternak Babi		30,000,000
Normalisasi Sungai Selalu Tahap 1		39,000,000
Percetakan Sawah		100,000,000
Pelatihan Penataan Keuangan Desa		23,993,000
Konsultasi dan Evaluasi APBDes		43,500,000
Pelatihan Penyusunan RAB		5,100,000
Pembangunan Pasar Desa		45,000,000
Pelatihan Pengelolaan Keuangan BumDes		12,900,000
Bidang Bencana Alam		106,320,800
Kegiatan Penanggulangan Bencana		76,620,800
Kegiatan Keadaan Mendesak		29,700,000

GERDEMA

Saya Ada Untuk Semua
Bersama kita pasti bisa

SALAM HARMONIS
UNTUK KITA SEMUA


Kreatifitas
Membantu
Kembangkan

APREM S.Th
KEPALA DESA SEMPAYANG

j.

Pemerintah
DESA LUNG KEBINU

infografik APBDES 2020 PERUBAHAN DESA LUNG KEBINU




Lepinus Ganang
Kepala Desa Lung Kebinu

Pendapatan Transfer Rp. 1.774.223.000

DANA DESA	1.012.267.000
ALOKASI DANA GERDEMA	501.956.000
ALOKASI DANA RT BERSIH	260.000.000
JUMLAH PENDAPATAN	1.774.223.000
Silpa Tahun 2019	
Dana Gerdema	3.382.964
Jumlah Silpa Tahun 2019	3.382.964

BELANJA

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
Penyelenggaraan Belanja Silpa, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	865.935.464
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	547.338.964
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	36.000.000
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD dll)	250.956.000
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD dll)	129.000.000
Penyediaan Tunjangan BPD	3.382.964
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	45.000.000
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	23.000.000
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	60.000.000
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Pemerintahan	167.226.500
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	167.226.500
Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	18.000.000
Pengelolaan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	18.000.000
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	132.970.000
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.000.000
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.000.000
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	17.340.000
Koordinasi/kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	20.290.000
	85.350.000
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
Sub Bidang Pendidikan	642.740.500
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	37.860.000
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	20.500.000
Sub Bidang Kesehatan	17.360.000
Penyelenggaraan Pos-yandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	17.360.000
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kadus Kesehatan dll)	47.690.500
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.500.000
Pemeliharaan Jalan Desa	28.190.500
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	237.180.000
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	210.790.000
Pemeliharaan Sumbur Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampungan Air, Sum Ur Bor dll)	26.400.000
Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	70.000.000
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	70.000.000
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	250.000.000
	250.000.000
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	95.735.000
Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa Ikt, Kec/ Kab/Kot)	95.735.000
Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa Ikt, Kec/ Kab/Kot)	50.000.000
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaa	16.200.000
	29.535.000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	84.200.000
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggiliran)	36.160.000
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggiliran)	36.160.000
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	48.040.000
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	48.040.000
	48.040.000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	78.888.000
Belanja Tidak Terduga	26.993.000
Sub Bidang Penanggulangan Mendesak	26.993.000
Belanja Tidak Terduga	51.595.000
	51.595.000
PENYURUTAN BELANJA DESA	
JUMLAH BELANJA	1.766.798.964
SURPLUS / (DEFISIT)	7.424.036
PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan	3.382.964
PEMBIAYAAN NETTO	3.382.964



Saya Rela Untuk Desa
Berani Muli Pasti Baku



INFO GRAFIS APBDES TAHUN 2020

DESA TANJUNG KERANJANG

KECAMATAN MALINAU KOTA KABUPATEN MALINAU

PROVINSI KALIMANTAN UTARA



JERI MARTINUS, SE
KEPALA DESA TANJUNG KERANJANG

PENDAPATAN TRANSFER	2.639.434.000
DANA DESA	1.187.889.870
ALOKASI DANA DESA	
DANA GERDEMA	514.956.000
DANA RT BERSIH	1.040.000.000
SILPA TAHUN 2019	
SILPA DANA DESA	103.411.870
SILPA DANA RT BERSIH	-
SILPA DANA DESA TAHUN 2019	10.807.000
BELANJA	2.742.845.870

I BELANJA DANA GERDEMA	514.956.000
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	514.956.000
1. Tunjangan Kepala Desa	36.000.000
2. Tunjangan Aparat Desa	165.883.000
3. Tunjangan LPM	45.000.000
4. Tunjangan BPD	45.000.000
5. Tunjangan LAD	21.800.000
6. Tunjangan Operator Siskeudes	15.000.000
7. Operasional Kantor Desa	50.000.000
8. Operasional LPM	23.000.000
9. Operasional BPD	23.000.000
10. Operasional LAD	5.000.000
11. Operasional PKK	36.000.000
12. Operasional Karang Taruna	5.000.000
13. Operasional Posyandu	10.000.000
14. Operasional Mobil Desa	28.073.000
15. Honor Kebersihan Kantor Desa	8.400.000

II BELANJA DANA RT BERSIH	1.040.000.000
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	284.155.000
1. Tunjangan Pengurus RT.01	35.400.000
2. Operasional RT.01	24.800.000
3. Musrenbang RT.01	5.000.000
4. Pengadaan Peralatan Inventaris Dapur RT.01	6.250.000
5. Tunjangan Pengurus RT.02	35.400.000
6. Operasional RT.02	24.800.000
7. Musrenbang RT.02	7.000.000
8. Pengadaan Peralatan Inventaris Dapur RT.02	3.900.000
9. Perengkapan Poo Kamling RT	6.408.000
10. Tunjangan Pengurus RT.03	35.400.000
11. Operasional RT.03	24.800.000
12. Musrenbang RT.03	5.000.000
13. Tunjangan Pengurus RT.04	35.400.000
14. Operasional RT.04	24.800.000
15. Musrenbang RT.04	10.500.000

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	284.280.000
1. Pengadaan Perengkapan Anak Sekolah RT.01	21.800.000
2. Bantuan Makanan Tambahan Untuk Lansia RT.01	2.000.000
3. Bantuan Alat Kesehatan Masyarakat RT.01	2.100.000
4. Pembangunan Drainase RT.01	43.250.000
5. Pengadaan Perengkapan Anak Sekolah RT.02	8.500.000
6. Bantuan Makanan Tambahan Untuk Lansia RT.02	4.900.000
7. Pembuatan Pagar RT.02 (30 Meter)	34.750.000
8. Pembuatan Poo Kamling RT.02 (2x3 Meter)	15.220.000
9. Pembuatan Pagar RT.03	40.000.000
10. Kegiatan Bulan Bakti RT Bersih RT.03	5.000.000
11. Pembuatan Gubang RT.03 (3x4 Meter)	15.000.000
12. Pembangunan Pagar RT.04 Tahap 3 (100 Meter)	91.750.000

c. Bidang Pembinaan Masyarakat	69.115.000
1. Kegiatan Pergelaran Seni Budaya RT.01	9.990.000
2. Kegiatan Pergelaran Seni Budaya RT.02	15.000.000
3. Belanja ATK dan Konsumsi Petugas Ronda RT.02	8.375.000
4. Kegiatan Pergelaran Seni Budaya RT.03	20.000.000
5. Kegiatan Pergelaran Seni Budaya RT.04	15.250.000

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	279.450.000
1. Pengadaan Alat Pertanian Untuk Petani RT.01	79.800.000
2. Pelatihan Budidaya Ikan Lela RT.02	6.950.000
3. Pengadaan Tong Gas RT.02	7.500.000
4. Pengadaan Tangki Semprot dan Racun Rumpuk RT.02	21.000.000
5. Pengadaan Benih Ikan Lela dan Perengkapan RT.02	30.000.000
6. Pengadaan Bibit Buah dan Gerobak RT.03	82.000.000
7. Pengadaan Tangki Semprot dan Racun Rumpuk RT.04	52.400.000

e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	122.000.000
1. Kegiatan Penanggulangan Bencana Covid-19 RT.01	30.000.000
2. Kegiatan Penanggulangan Bencana Covid-19 RT.02	30.000.000
3. Kegiatan Penanggulangan Bencana Covid-19 RT.03	33.000.000
4. Kegiatan Penanggulangan Bencana Covid-19 RT.04	30.000.000

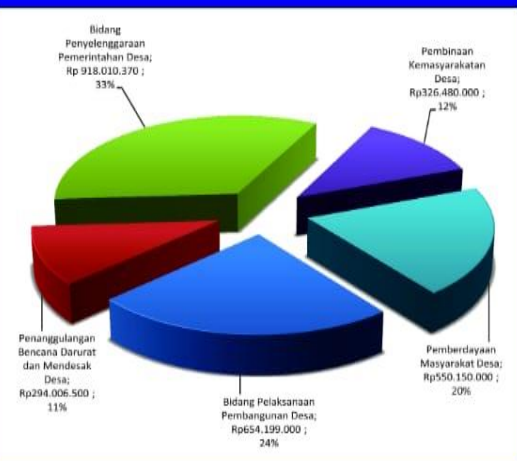
III. BELANJA DANA DESA	1.187.889.870
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	118.889.370
1. Kegiatan Musyawarah Desa	41.000.000
2. Penyusunan APBDDes dan Fotocopy LPU	33.528.370
3. Kegiatan LKPPDes	22.190.000
4. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	6.875.000
5. Pembuatan SKPT Untuk Warga	15.300.000

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	369.919.000
1. Insentif Guru PAUD	14.400.000
2. Insentif Guru Keagamaan	18.240.000
3. Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Anak dan Lansia	17.015.000
4. Operasional KPM (Kader Pembangunan Manusia)	43.452.000
5. Pengadaan Sandal Rematik, Kacamata dan Alat Pendengar Untuk Lansia	11.322.000
6. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	18.400.000
7. Pembangunan Drainase Gang Bonsel (44 Meter)	21.670.000
8. Pembuatan Drainase Kelling Balai Adat (108 Meter)	48.340.000
9. Pembuatan Siring Balai Adat (71 Meter)	68.417.000
10. Pembunian Lokasi Balai Adat	57.990.000
11. Pembuatan Tambalan Perahu di Tepian Perawahan	45.113.000
12. Pemasangan Air Bersih Kantor PKK	5.600.000

c. Bidang Pembinaan Masyarakat	257.365.000
1. Promosi Potensi Desa	32.360.000
2. Konsumsi Kegiatan Natal GKH	20.800.000
3. Kegiatan Pergelaran Seni dan Budaya Desa	50.300.000
4. Perayaan HUT RI di Desa	15.000.000
5. Pengadaan Alat Keselamatan Sanger Tani	67.000.000
6. Pembentukan Sanger Tani dan Pelatihan Tani	10.900.000
7. Sarana Prasana Karang Taruna	41.015.000

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	279.700.000
1. Pengadaan Racun Rumpuk dan Racun Hama Untuk Petani	122.000.000
2. Pengadaan Mesin Perontok Padi Untuk Kelompok Tani	32.000.000
3. Pengadaan Bibit Buah Rambutan dan Bibit Durian Unggul	102.200.000
4. Perawatan Sakuran Ijigasi di Lahan Pertanian (1000 Meter)	14.500.000

e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	171.000.500
1. Penanggulangan Bencana Covid-19	65.405.500
2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	78.600.000



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR
DESA WISATA SETULANG
Alamat : Jalan Lidung Angan RT.01 Desa Wisata Setulang, Kec.Malinau Selatan Hilir (77552)



HANSICOV
Kepala Desa Wisata Setulang

INFO GRAFIS APBDES (PERUBAHAN)
DESA WISATA SETULANG
TAHUN ANGGARAN 2020

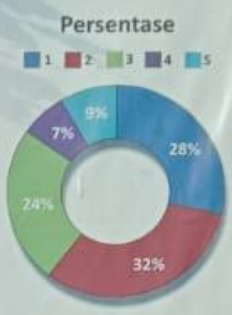
NO	PENDAPATAN DESA	JUMLAH
1	DANA DESA	Rp 1.776.127.000
2	ALOKASI DANA DESA (GERDEMA)	Rp 346.756.000
3	ALOKASI DANA DESA (REBELSIH)	Rp 1.540.000.000
4	PENDAPATAN ANJ DUSA	Rp 30.000.000
5	SILPA 2018	Rp 41.199.421
JUMLAH PENDAPATAN		Rp 3.958.292.421

NO	PEMBAYARAN DESA	JUMLAH
A	PENERIMAAN DESA	Rp 5.508.373
B	PENGELUARAN PEMBAYARAN	Rp 50.000.000
JUMLAH (A-B)		Rp 44.491.627

NO	REKONSTRUKSI DAN PERBAIKAN PERUMAHAN DESA	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Rekonstruksi Masjid/Tanjung Suci/Desa	Rp 1.116.227.373	
2	Rekonstruksi Masjid/Tanjung Suci/Desa	Rp 36.000.000	
3	Rekonstruksi Masjid/Tanjung Suci/Desa	Rp 17.200.000	
4	Rekonstruksi LPM	Rp 75.200.000	
5	Rekonstruksi RPD	Rp 47.400.000	
6	Rekonstruksi Lembaga Adat	Rp 34.000.000	
7	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 18.000.000	
8	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
9	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
10	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
11	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
12	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
13	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
14	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
15	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
16	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
17	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
18	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
19	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
20	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
21	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
22	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
23	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
24	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
25	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
26	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
27	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
28	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
29	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
30	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	

NO	REKONSTRUKSI DAN PERBAIKAN PERUMAHAN DESA	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Rekonstruksi Masjid/Tanjung Suci/Desa	Rp 1.116.227.373	
2	Rekonstruksi Masjid/Tanjung Suci/Desa	Rp 36.000.000	
3	Rekonstruksi Masjid/Tanjung Suci/Desa	Rp 17.200.000	
4	Rekonstruksi LPM	Rp 75.200.000	
5	Rekonstruksi RPD	Rp 47.400.000	
6	Rekonstruksi Lembaga Adat	Rp 34.000.000	
7	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 18.000.000	
8	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
9	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
10	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
11	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
12	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
13	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
14	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
15	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
16	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
17	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
18	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
19	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
20	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
21	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
22	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
23	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
24	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
25	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
26	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
27	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
28	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
29	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
30	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	

NO	BELANJA DESA	JUMLAH
1	BIDANG PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 1.116.227.373
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp 1.249.116.618
3	BIDANG PEMBINAAN KOMUNITAS DESA	Rp 966.317.696
4	BIDANG PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA	Rp 267.666.800
5	BIDANG BELANJA DAMBAH DAN MENDESAK DESA	Rp 184.739.107
JUMLAH BELANJA		Rp 3.913.790.297



NO	BIDANG	ANGGARAN	SUMBER DANA
REKONSTRUKSI DAN PERBAIKAN PERUMAHAN DESA			
1	Rekonstruksi Masjid/Tanjung Suci/Desa	Rp 1.116.227.373	
2	Rekonstruksi Masjid/Tanjung Suci/Desa	Rp 36.000.000	
3	Rekonstruksi Masjid/Tanjung Suci/Desa	Rp 17.200.000	
4	Rekonstruksi LPM	Rp 75.200.000	
5	Rekonstruksi RPD	Rp 47.400.000	
6	Rekonstruksi Lembaga Adat	Rp 34.000.000	
7	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 18.000.000	
8	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
9	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
10	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
11	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
12	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
13	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
14	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
15	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
16	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
17	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
18	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
19	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
20	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	

NO	BIDANG	ANGGARAN	SUMBER DANA
REKONSTRUKSI DAN PERBAIKAN PERUMAHAN DESA			
1	Rekonstruksi Masjid/Tanjung Suci/Desa	Rp 1.116.227.373	
2	Rekonstruksi Masjid/Tanjung Suci/Desa	Rp 36.000.000	
3	Rekonstruksi Masjid/Tanjung Suci/Desa	Rp 17.200.000	
4	Rekonstruksi LPM	Rp 75.200.000	
5	Rekonstruksi RPD	Rp 47.400.000	
6	Rekonstruksi Lembaga Adat	Rp 34.000.000	
7	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 18.000.000	
8	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
9	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
10	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
11	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
12	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
13	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
14	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
15	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
16	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
17	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
18	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
19	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
20	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	

NO	BIDANG	ANGGARAN	SUMBER DANA
REKONSTRUKSI DAN PERBAIKAN PERUMAHAN DESA			
1	Rekonstruksi Masjid/Tanjung Suci/Desa	Rp 1.116.227.373	
2	Rekonstruksi Masjid/Tanjung Suci/Desa	Rp 36.000.000	
3	Rekonstruksi Masjid/Tanjung Suci/Desa	Rp 17.200.000	
4	Rekonstruksi LPM	Rp 75.200.000	
5	Rekonstruksi RPD	Rp 47.400.000	
6	Rekonstruksi Lembaga Adat	Rp 34.000.000	
7	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 18.000.000	
8	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
9	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
10	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
11	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
12	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
13	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
14	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
15	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
16	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
17	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
18	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
19	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
20	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	

NO	BIDANG	ANGGARAN	SUMBER DANA
REKONSTRUKSI DAN PERBAIKAN PERUMAHAN DESA			
1	Rekonstruksi Masjid/Tanjung Suci/Desa	Rp 1.116.227.373	
2	Rekonstruksi Masjid/Tanjung Suci/Desa	Rp 36.000.000	
3	Rekonstruksi Masjid/Tanjung Suci/Desa	Rp 17.200.000	
4	Rekonstruksi LPM	Rp 75.200.000	
5	Rekonstruksi RPD	Rp 47.400.000	
6	Rekonstruksi Lembaga Adat	Rp 34.000.000	
7	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 18.000.000	
8	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
9	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
10	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
11	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
12	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
13	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
14	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
15	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
16	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
17	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
18	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
19	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	
20	Rekonstruksi Masjid Kuar/Desa	Rp 12.000.000	

Saya Ada Untuk Semua
Bersama kita pasti bisa
Salam Harmonis
UNTUK KITA SEMUA



c. Musrenbangdes









d. BUMDes







C. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau tahun 2020 sebesar Rp. 11.059.809.392.50 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.398.934.180 dan belanja langsung sebesar Rp. 6.524.527.500.

Tabel 3.10

Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau
Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA	11.059.809.392.50	10.770.825.050	97,39
1	Belanja Tidak Langsung	4.535.281.892.50	4.398.934.189	96,99
2	Belanja Langsung	6.524.527.500	6.371.890.870	97,66

Sumber : Sub Bagian Keuangan

Alokasi anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau tahun 2020 sebesar 11.059.809.392.50 yang telah terealisasi sebesar Rp.10.770.825.050 atau tercapai 97,39% terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Tabel 3.11

Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Belanja Langsung Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA LANGSUNG	6.524.527.500	6.371.890.870	97,66
1	Belanja Pegawai	3.079.430.000	3.014.770.000	96
2	Belanja Barang dan Jasa	3.432.097.500	3.357.120.870	97
3	Belanja Modal	0	0	0

Sumber : Sub Bagian Keuangan

Realisasi anggaran Belanja Langsung mencapai Rp. 6.371.890.870 atau 97,66% dari target anggaran sebesar Rp. 6.524.527.500 Anggaran Belanja Langsung dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun. Belanja Langsung terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Untuk perincian alokasi dan realisasi anggaran per program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.12

Target dan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan Tahun 2020

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional	-	-	-
2	Penyediaan jasa administrasi Keuangan	27.120.000	26.560.000	97,94
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	11.747.000	11.747.000	100

4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.584.000	13.584.000	100
5	Penyediaan makan dan minuman	4.950.000	4.950.000	100
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	180.520.000	180.378.600	99,92
7	Penyediaan bahan bakar minyak	5.000.000	4.998.000	99,96
II	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur			
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	17.165.175	1.320.000	7,69
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	45.000.000	45.000.000	100
III	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			
1	Penunjang kegiatan mahasiswa kuliah nyata (KKN)	10.000.000	-	-
IV	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan			
1	Pembentukan dan pembinaan BUMDes dan BUMDes bersama	53.960.000	53.918.300	99,92
2	Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Rukun Tetangga (Perda RT	779.500.000	767.608.400	98,47
3	Pembukaan dan penutupan Bulan Bhakti RT Bersih	160.360.000	160.360.000	100
4	Penunjang musyawarah perencanaan pembangunan desa	193.842.500	193.206.900	99,67

5	Penunjang musyawarah perencanaan pembangunan RT (LP3MD)	192.040.000	179.673.000	93,56
6	Evaluasi Raperdes tentang APBDes	296.260.000	289.556.000	97,74
7	Lomba gelar TTG tingkat Kabupaten, provinsi dan nasional	57.320.000	56.660.000	98,85
8	Penunjang kegiatan TNI manunggal membangun Desa (TMMD)	758.680.000	758.680.000	100
9	Pembinaan administrasi dan verifikasi keuangan desa	120.600.000	120.335.500	99,78
V	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			
1	Penunjang tenaga pendamping desa	3.064.279.825	3.001.784.650	97,96
2	Evaluasi, monitoring dan pembinaan penggunaan dana desa	79.419.000	79.319.398	99,87
VI	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan			
1	Rapat koordinasi tingkat kabupaten dan provinsi	50.000.000	50.000.000	100
2	Jambore kader PKK	117.430.000	117.215.000	99,82
3	Rapat konsultasi PKK	50.000.000	49.951.800	99,90
4	Supervisi pelaporan, evaluasi dan monitoring	25.000.000	21.670.000	86,68

5	Oprasional kantor PKK	183.750.000	156.799.422	85,33
6	Pembinaan kelompok dasawisma	25.000.000	24.998.000	99,99
7	Pendataan pos pelayanan terpadu (POSYANDU) se- Kabupaten Malinau	-	-	-
8	Pendataan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) se- Kabupaten Malinau	-	-	-

Sumber : Sub Bagian Keuangan

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau periode tahun 2020. Pada awal tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau telah menetapkan Perjanjian Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

4.1. Kesimpulan.

Secara umum dari keseluruhan 2 (dua) Pencapaian sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja utama yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau tahun 2020 rata – rata capaian kinerja yang diraih 97 % masuk kategori berhasil, kondisi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa.	Persentase desa yang Memiliki Profil Desa	98
		Persentase Desa yang Menyusun APBDes tepat waktu	100
2.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pelayanan ekonomi, sosial dan budaya dalam membangun desa.	Persentase partisipasi masyarakat yang aktif dalam Musrenbang	95
		Persentase BUMDes yang aktif	95
Jumlah			97

4.2. Upaya Perbaikan.

Dalam rangka untuk mewujudkan kinerja organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa yang disusun dalam 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator, secara umum capaian sasarnya sudah berhasil, namun demikian untuk 2 (dua) indikator masih kurang berhasil pencapaiannya yaitu :

Sasaran ke 2 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pelayanan ekonomi, sosial dan budaya dalam membangun desa.

Upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian target untuk sasaran ini adalah melakukan evaluasi dan rencana aksi strategis dalam menyusun pelaksanaan program dan kegiatan melalui optimalisasi kinerja dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk indikator dengan kategori tidak berhasil.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau tahun 2020 yang menggambarkan capaian kinerja terhadap indikator kinerja organisasi.